

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku – Buku

- Akhmad Fauzi, 2002, *Ekonomi Perikanan – Teori Kebijakan dan Pengelolaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara – Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan, Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, Malang : Setara Press, 2015, Hlm 8-9
- Damarwan Yusran, Syofyan Hasan, Abdi Suhufan, 2016, *Kerlip Cahaya di Perbatasan*, Jakarta : Destructive Fishing Watch – Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Dikdik Mohamad Sodik, S.H., MH., Ph.D, 2011, *Hukum Laut Internasional*, Reflika Aditama, Bandung.
- Elfindri, 2002, *Ekonomi Patron-Client-Fenomena Micro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*, Andalas University Press, Padang.
- Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Adma Jaya Press, Yogyakarta.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Kementerian Kelautan dan perikanan, 2015, *Album Peta Pulau-pulau Kecil Terluar di Wilayah Indonesia Bagian Timur*, temprint, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, Ety Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industry perikanan di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan perikanan dan International Organization for Migration (IOM) serta Coventry University, 2015.

- Luhulima, 2011, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional*, 2009, Witra Irzani, Pekanbaru.
- Marhaeni Ria Siombo, 2002, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia, Jakarta Hal. 119
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Munadjat Danusaputro, 1981, *Wawasan Nusantara dalam Pendidikan dan Kebudayaan*, Alumni, Bandung.
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi si Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Narzif, 2003, *Modul Hukum Laut Indonesia Lahirnya Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia– Rezim Perairan di Zaman Kolonial*, Universitas Andalas, Padang.
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan dari Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Shaw Malcolm, 2003, *International Law Fifth Edition*, United Kingdom : University Press, Cambridge.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Starke, 2014, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widyatmadja, Josep, 2009, *kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi*, Kanisus, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, . 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

1. Aturan Hukum Internasional

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

Commision for Conservation of Artartic Marine Living Resources (CCAMLR)
tahun 1997

United Nation Fish Stock Agreement 1995

International Plan of Action (IPOA) – Illegal Unreported Unregulated (IUU)
Fishing 2011

2. Aturan Hukum Nasional

Undang - Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Peraturan President nomor 16 tahun 2017 tentang Penegakan Hukum Laut
Indonesia

Peraturan Menteri PERMEN KP nomor 57 / PERMENKP / 2014 tentang
perubahan kedua atas Permen KP nomor 30 /MEN / 2012 tentang
Usaha Perikanan Tangkap di wilayah perairan Republik Indonesia

C. Artikel

Amelya Gustina, *Analisis Transshipment Pasal 69 ayat 3 Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan
tangkap*, Studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung
RI

Rokhmin Dahuri, *AnatomiPermasalahan Illegal Fishing dan Solusinya*,
kopasiana.com.

D. Jurnal

Administrator, *Ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, Illegal
Fishing, dan Lintas Pelayaran Kapal Perang dalam Hukum Laut
Internasional*” Hal. 25
[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11747/F.%20BA
B%2011.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11747/F.%20BA
B%2011.pdf?sequence=6&isAllowed=y) Diakses pada tanggal 28
Oktober 2017

Administrator, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*,
Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional Badan Perencanaan

Pembangunan nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hal. 1-2 <http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=50077> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017

Administrator, <http://digilib.unila.ac.id/9281/6/I%20SIAP.pdf> Diakses pada tanggal 1 November 2017

Administrator, background Fish Stock Agreement, Oceans and Laws of the Sea United Nation, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017

Dewinta Ayu Syahrani, *Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU) pada Ekspor Ikan Tuna dan Udang Tangkap*, Jurnal Administrasi Bisnis Vo. 45 No. 1 2017 hal. 29-31 <https://media.neliti.com/media/publications/87805-ID-analisis-peran-kebijakan-illegal-unrepor.pdf> Diakses pada tanggal 1 November 2017

Radityo Pramada dan Sonny Koeshendrajana, “Kebijakan pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan”. Jakarta. Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 2 2012 hal. 221-222 <https://media.neliti.com/media/publications/52341-ID-kebijakan-pengelolaan-konservasi-kelauta.pdf> diakses pada 28 Oktober 2017

Riana Susmayanti, Hukum Internasional dalam pengantar hukum Indonesia, hlm. 15 <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/HUKUM-INTERNASIONAL.pdf> Diakses pada tanggal 1 November 2017

Suparman A Diraputra, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan”. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 2014. Hal. 2-4 http://www.bphn.go.id/data/documents/na_tentang_zona_tambahan_final.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober 2017

Zulkifli Rahman, Sejarah Kemaritiman Indonesia, 29 September 2012, hal 13 *Journal of Economics and Sustainable Development* ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.4, No.1, 2013 www.iiste.org (diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 22:14 WIB)

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin *International Journal* Volume 1 Nomor 3 Maret 2014, Manuputy et al, *Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Laut*, 2014

E. Internet

Mina Bahari, *Kenapa harus dimulau dari illegal fishing?*, 2015, Edition, p.1
www.kkp.go.id Diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

FAO Documents International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Rome, 2001,
<http://www.fao.org/3/contents/faadeaa5-d06e-5df3-9cea-14a536d66cf5/y1224e00.htm> Diakses pada tanggal 1 November 2017

Administrator, PERMEN KP 57/2014, Info Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
<https://www.google.com/search?q=permen+kp+no+57+tahun+2014+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> Diakses pada tanggal 1 November 2017

<http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>
(diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 02.24 WIB)

<http://ppiuk.org/mengenang-kejayaan-majapahit-sebagai-kerajaan-negara-maritim-yang-kuat/> diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 01:13 WIB

<http://kbbi.web.id/diplomasidiakses> pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 02.00 WIB

<https://www.merdeka.com/uang/kekayaan-natuna-yang-buat-china-gelap-mata.html>

